



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Taman Siswa No 1 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id> email: perkimptanahan.sumbar@gmail.com

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMANDAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta target Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renja Tahun 2021 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 dan menjadi bahan materi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun semoga dapat membantu pelaksanaan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas

Ir. AKHIRUDDIN
NIP 19631001 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD 2018	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV PENUTUP	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen tahunan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta memuat indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Oleh sebab itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2021 yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan Renja OPD disusun oleh tim penyusun berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan menjadi dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 217/SK-Perkimtan/II/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2021 adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2021 adalah :

1. Mensikronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPd tahun 2021.



2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dengan anggaran.
5. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata persentase pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2019 ini adalah Rp 13.733.191.785,85 atau 99,60% untuk fisik sedangkan capaian kinerja keuangan 81,70% dari total anggaran Rp. 16.809.306.832,00. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	% KEUANGAN	% FISIK
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.393.329.950	1.347.547.311	96,71%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.465.000	2.667.950	77,00%	100%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	197.580.528	197.580.516	100,00%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.997.400	89.976.060	99,98%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.398.000	57.333.014	99,89%	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.059	8.869.740	98,64%	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	9.291.000	8.160.000	87,83%	100%



	Perundang-Undangan				
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	938.605.963	904.715.031	96,39%	100%
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	88.000.000	78.245.000	88,91%	100%
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.148.305	562.956.464	92,72%	100%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.910.500	141.535.114	99,04%	100%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	31.750.000	31.694.000	99,82%	100%
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.487.805	389.727.350	90,11%	100%
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	57.527.800	57.527.800	100,00%	100%
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.527.800	57.527.800	100,00%	100%
IV	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	84.220.800	61.600.700	73,14%	100%
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.220.800	61.600.700	73,14%	100%
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	650.589.000	570.501.100	87,69%	100%
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	65.762.000	43.810.100	66,62%	100%
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	312.322.000	285.890.300	91,54%	100%
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.630.000	29.466.140	59,37%	100%
17	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	68.889.000	60.085.560	87,22%	100%
18	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD	153.986.000	151.249.000	98,22%	100%
VI	Pengembangan Perumahan	1.803.496.500	1.688.657.540	93,63%	100%
19	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	106.700.000	86.361.000	80,94%	100%



20	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	123.852.500	106.217.400	85,76%	100%
21	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	351.000.000	343.217.440	97,78%	100%
22	Updating Data Rumah Tidak Layak huni di Provinsi Sumatera Barat	682.944.000	638.940.400	93,56%	100%
23	Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota	344.000.000	334.674.700	97,29%	100%
24	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	195.000.000	179.246.600	91,92%	100%
VII	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630	8.992.892.084	76,70%	96,82%
25	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.153.088.000	1.114.274.865	96,63%	100%
26	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	8.298.511.630	5.663.426.492,35	68,25%	87,27%
27	Updating Database Kawasan Kumuh	873.756.000	842.470.750	96,42%	100%
28	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal	1.400.000.000	1.372.719.976,50	98,05%	100%
VIII	Pengelolaan Pertanahan	487.638.847	451.508.787,00	92,59%	100%
29	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	86.708.000	77.893.750,00	89,83%	100%
30	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	50.244.000	46.306.796,00	92,16%	100%
31	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	106.682.847	103.287.916,00	96,82%	100%
32	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	62.236.000	60.753.755,00	97,62%	100%
33	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	84.808.000	77.199.960,00	91,03%	100%



34	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	44.208.000	41.124.000,00	93,02%	100%
35	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	52.752.000	44.942.610,00	85,20%	100%
	JUMLAH	16.809.306.832	13.733.191.785,85	81,70%	99,60%

Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 7 (tujuh) program diatas berkinerja baik dan satu program berkinerja cukup, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019 (Berdasarkan Program)

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	8.520.502.995,00	100	6.380.505.201,00	75%
	a. Gaji dan Tunjangan	5.686.609.957,00	100	4.237.261.248,00	75%
	b. Tambahan Penghasilan PNS	2.833.893.038,00	100	2.143.243.953,00	76%
B	Belanja Langsung	16.809.306.832,00	100	13.733.191.785,85	81,7%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.393.329.950,00	100	1.347.547.311,00	97%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.148.305,00	100	562.956.464,00	93%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.527.800,00	100	57.527.800,00	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	84.220.800,00	100	61.600.700,00	73%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	650.589.000,00	100	570.501.100,00	88%
6	Program Pengembangan Perumahan	1.803.496.500,00	100	1.688.657.540,00	94%
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630,00	96,8	8.992.892.083,85	77%
8	Program Pengelolaan Pertanahan	487.638.847,00	100	451.508.787,00	93%
	TOTAL	25.329.809.827,00	91	20.113.696.986,85	79%



Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarannya dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.393.329.950,00 dan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.347.547.311,00 atau sebesar 97% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.465.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 2.667.950,00 atau 77% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - b) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.580.528,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 197.580.516,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
 - c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.997.400,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 89.976.060,00 atau 99,98% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.398.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 57.333.014,00 atau 99,89% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.992.059,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 8.869.740,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar



- Rp. 8.160.000,00 atau 87,83% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 938.605.963,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 904.715.031,00 atau 96,39% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
- h) Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 78.245.000,00 atau 88,91% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.148.305,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 562.956.464,00 atau 96,32% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.910.500,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 141.535.114,00 atau 99,04% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
- b) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.750.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 31.694.000,00 atau 99,82% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.
- c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.487.805,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 389.727.350,00 atau 90,11% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.



- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 dengan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 57.527.800,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.527.800,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 52.527.800,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparat sipil negara pada organisasi perangkat daerah.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 dengan realisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 73,14% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.220.800,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 61.600.700,00 atau 73,14% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparat mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparat untuk mendukung tupoksi.

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.589.000,00 teralisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 570.501.100,00 atau 80,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.762.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 43.810.100,00 atau 66,62% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%
 - b) Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.322.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 285.890.300,00 atau 91,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendaharan pengeluaran, laporan keuangan dll. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%



- c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.630.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 29.466.140,00 atau 59,37% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
 - d) Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.889.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 60.085.560,00 atau 87,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.
 - e) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.986.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 151.249.000,00 atau 98,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.
- 6) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 1.803.496.500,00 teralisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.688.657.540,00 atau 99,17% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.852.500,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 106.217.400,00 atau 85,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota.
 - b) Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah Yang Aman Terhadap Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 179.246.600,00 atau 91,92% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan



Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan. Dengan hasil Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam.

- c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.700.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 86.361.000,00 atau 80,94% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
 - d) Penyusunan SPM Bidang perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 343.217.440,00 atau 97,78% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
 - e) Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 682.944.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 638.940.400,00 atau 93,56% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terupdatenya data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat.
 - f) Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 334.674.700 atau 97,29% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pendampingan terhadap penyempurnaan Dokumen Penyediaan Perumahan (RP3KP) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya tersusunnya Dokumen Penyediaan Perumahan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi dokumen pendukung bagi pelaksanaan penyediaan perumahan.
- 7) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 1) Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar



Rp. 1.153.088.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.114.274.865,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :

- Perencanaan PLP2K-BK Kawasan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- Perencanaan PLP2K-BK Kabupaten Pasaman Barat

Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

- 2) Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.298.511.630,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 5.663.426.493,00 atau 68,25% dan realisasi fisik sebesar 87,2% berupa Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :

- Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan terlaksana dengan progres pekerjaan selesai 100%.
- Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman, pekerjaan tidak terlaksana seluruhnya dan progres pekerjaan yang dapat diselesaikan 55,43%.
- Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Strategis Danau Singkarak Kabupaten Solok, pekerjaan terlaksana dengan progres pekerjaan selesai 100%.

- 3) Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 1.372.719.976,00 atau 98,05% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus. Dengan hasil tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan khusus. Pembangunan PSU di Kawasan Linggai Kabupaten Agam merupakan pembayaran kontrak Tahun 2018 yang pekerjaannya pada saat akhir tahun anggaran 2018 belum selesai dilaksanakan. Pekerjaan yang dilaksanakan terdiri dari : 1). Pembangunan



- Kawasan pariwisata Linggai Kabupaten Agam, 2). Pengawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam. 3). Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam dan Pengawasan.
- 4) Updating Data Kawasan Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.756.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp 842.470.750,00 atau 98,05% dan realisasi fisik 100% berupa terupdatenya data kawasan kumuh di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan tersedianya database kondisi serta lokasi sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan kumuh sesuai kewenangan.
- 8) Program Pengelolaan Pertanahan
- a) Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.808.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 77.199.960,00 atau 91,03% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
- b) Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.752.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 44.942.610,00 atau 85,2% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.
- c) Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.708.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 77.893.750,00 atau 89,83% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaaln pertanahan.
- d) Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.244.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar



Rp. 46.306.796,00 atau 92,16% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.

- e) Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.682.847,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 103.287.916,00 atau 96,82% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- f) Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.236.000,00 terealisasi sampai desember 2019 sebesar Rp. 60.753.755,00 atau 97,62% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
- g) Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.208.000,00 terealisasi sampai desember 2019 Rp. 41.124.000,00 atau 93,02% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pemberian izin lokasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja.



Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	3 lokasi	3 lokasi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Mengurangi Backlog Rumah	1 %	0,72 %	72%
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitas Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85 %	85 %	100%

Sasaran Pertama adalah Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2019. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2019 dengan nilai B atau capaian sebesar 100%. Diharapkan tahun 2020 target nilai B tetap dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan memiliki indikator kinerja berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan target yang telah ditentukan yaitu 3 (dua) lokasi. Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dengan target 3 lokasi pada tahun 2019 dapat dicapai 100%. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih



banyak yang belum di tangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi adalah 7317, 85 hektar. Beberapa kegiatan yang mendukung penanganan kawasan kumuh di tiga lokasi yang dilaksanakan tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan PSU Kawasan Strategis Danau Singkarak berlokasi di Kabupaten Solok berupa pembangunan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
2. Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya berupa pembangunan jalan lingkung dan drainase sebagai prasarana penunjang permukiman.
3. Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak di Kabupaten Pasaman dengan membangun PSU penunjang permukiman kumuh berupa drainase dan pembangunan MCK.

Sasaran Ketiga adalah Meningkatkan Kualitas Perumahan

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi backlog rumah dengan target 1% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat dicapai tahun 2019. Backlog rumah adalah indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kepenghunian dan kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal : 1 keluarga menghuni 1 rumah. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 0,72% karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap. Pemenuhan Data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2019 hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi atau swakelola belum tersedia.

Tabel 3.4
Backlog Perumahan

Backlog Kepemilikan (BKKBN) (Unit)	Pembangunan Rumah Tahun 2019 (REI+Rusun MBR) (Unit)	Penurunan Backlog (persentase)	Target	% Capaian
343.189	2473	0,72%	1%	72%



Berdasarkan data yang bersumber dari BKKBN untuk tahun 2019 backlog kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Barat adalah 343.189 unit artinya masih ada kekurangan rumah sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang bisa di data saat ini hanya dari penyediaan rumah yang di bangun oleh pengembang berjumlah 2.226 unit, pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dengan jumlah 127 unit dan pembangunan rumah khusus oleh pemerintah pusat dengan jumlah 120 unit dengan total 2.473 unit. Konsep mengkhuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mengkhuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/mengkhuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure).

Sasaran Keempat adalah Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah pertanahan dengan target kinerja 85 %. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut ;



Isu-Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.
2. Ketersediaan Lahan (Land Banking), faktor ketersediaan tanah ini yang menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.
3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan kurangnya 'Sadar Hidup Bersih'.
4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.
5. Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.
6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki peraturan yang telah ditetapkan, sehingga meyulitkan masyarakat yang tidak punya slip gaji untuk memiliki rumah.
7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan yang layak.
8. Ketersediaan Data Rumah Tidak Layak Huni yang Valid.

Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
 - a. Pengembangan permukiman baru
 - b. Peningkatan kualitas permukiman
 - c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
 - d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan
 - f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
 - a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.



- b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanahan, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi



pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan.

Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang **Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yaitu *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2015 – 2019 terkait Bidang Perumahan

INDIKATOR	Kondisi 2014	Target Akhir 2019
INFRASTRUKTUR DASAR		
Kawasan Kumuh Perkotaan	37.407 Ha	0 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	13,5 Juta	6,8 Juta

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri dasar melalui keterpaduan pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumberdaya organisasi yang kompeten dan akuntabel. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2015-2019).

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumberdaya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumberdaya air,
2. Untuk dukungan terhadap **konektivitas nasional** guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan
3. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan **kebutuhan air minum** bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan **kebutuhan hunian dan permukiman yang layak**, peningkatan pemenuhan **akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan**



kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara selama RPJMD baru belum terbentuk. Oleh karena itu, penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 memedomani Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Terpenuhinya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
2. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kewenangan Provinsi terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda provinsi.
3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha.
4. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pengentasan kemiskinan.



- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

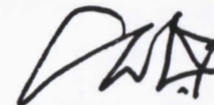
KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KETERANGAN	PAGU RPJMD	SELISIH
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL			26.218.000.000				55.555.814.199		26.218.000.000,00	-
1	01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		26.218.000.000				55.555.814.199			
	NON URUSAN		4.091.800.000				34.195.914.199		4.091.800.000	0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.627.800.000				1.784.808.900		1.627.800.000,00	0,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	17.875.000	APBD		12 Bulan	19.662.500			
	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	7 Orang Sopir	270.137.193	APBD		7 Orang Sopir	297.150.913			
	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	128.685.400	APBD		12 Bulan	141.553.940			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	57.717.000	APBD		12 Bulan	57.717.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	19.967.525	APBD		12 Bulan	21.964.278			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Exemplar	9.291.000	APBD		4 Exemplar	10.220.100			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	1.060.126.882	APBD		1 Tahun	1.166.139.570			
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	16 Publikasi	64.000.000	APBD		16 Publikasi	70.400.000			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.365.000.000				31.202.205.899		1.365.000.000,00	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 Unit Kendaraan Roda 4	219.048.500	APBD		7 Unit Kendaraan Roda 4	240.953.350			
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	65 Unit	35.000.000	APBD		65 Unit	38.500.000			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit Kendaraan Roda 4, 1 Unit Kendaraan Roda 2	630.413.428	APBD		2 Unit Kendaraan Roda 4, 1 Unit Kendaraan Roda 2	693.454.771			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KETERANGAN	PAGU RPJMD	SELISIH
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit Televisi, 6 unit PC, 6 Unit Printer, 1 Unit Meja Kerja Eselon III, 1 Buah Kursi Kerja Eselon III 4 Buah Lemari Arsip	208.452.526	APBD		2 Unit Televisi, 6 unit PC, 6 Unit Printer, 1 Unit Meja Kerja Eselon III, 1 Buah Kursi Kerja Eselon III 4 Buah Lemari Arsip	229.297.779			
	Pembangunan Gedung Kantor	1 Dokumen	272.085.546	APBD		1 unit gedung Kantor	30.000.000.000	Pada aplikasi SakatoPlan, pagu dana tersedia hanya Rp.272.085.546,00, sedangkan kebutuhan dana Rp.27.740.057.500,00		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		135.000.000				148.500.000		135.000.000,00	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Orang	135.000.000	APBD		198	148.500.000			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		112.000.000				123.200.000		112.000.000,00	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang Pelatihan Luar Daerah & 13 Orang Pelatihan Dalam Daerah	112.000.000	APBD		8 Orang Pelatihan Luar Daerah & 13 Orang Pelatihan Dalam Daerah	123.200.000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		852.000.000				937.200.000		852.000.000,00	0,00
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	100.570.000	APBD		3 Dokumen	110.627.000			
	Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	280.455.600	APBD		12 Bulan	308.501.160			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	108.570.000	APBD		3 Laporan	119.427.000			
	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	12 Bulan	130.484.358	APBD		12 Bulan	143.532.794			
	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	1 Tahun	231.920.042	APBD		1 Tahun	255.112.046			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KETERANGAN	PAGU RPJMD	SELISIH
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		20.707.200.000				19.799.000.000		20.707.200.000,00	-
	Program Pengembangan Perumahan		5.617.200.000				3.200.000.000		5.617.200.000,00	-
	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	60 orang x 3 Angkatan, 1 Laporan	385.000.000	APBD		60 orang x 3 Angkatan, 1 Laporan	250.000.000			
	Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	800.000.000			
	Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	60 Orang, 1 Angkatan	205.986.885	APBD		60 Orang, 1 Angkatan	200.000.000			
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	1 Laporan	129.392.000	APBD		1 Laporan	200.000.000			
	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	750.000.000	APBD		-	0			
	Updating Data Kebutuhan Rumah ASN di Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000			
	Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.524.460.315	APBD		1 Dokumen	500.000.000			
	Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	389.281.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	60 orang x 2 Angkatan, 1 Laporan	233.079.800	APBD		60 orang x 2 Angkatan, 1 Laporan	250.000.000			
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		15.090.000.000				16.599.000.000		15.090.000.000,00	-
	Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	1.232.631.400	APBD		2 Dokumen	1.355.894.540			
	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Lokasi	7.668.365.000	APBD		1 Lokasi	8.435.201.500			
	Pembangunan Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan MBR	1 Lokasi	2.273.235.600	APBD		1 Lokasi	2.500.559.160			
	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus	1 Lokasi	3.634.385.600	APBD		1 Lokasi	3.997.824.160			
	Pendataan PSU Kawasan Kumuh	1 dokumen	281.382.400	APBD		1 dokumen	309.520.640			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KETERANGAN	PAGU RPJMD	SELISIH
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU DANA			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PERTANAHAN		1.419.000.000				1.560.900.000		1.419.000.000,00	-
	Program Pengelolaan Pertanahan		1.419.000.000				1.560.900.000		1.419.000.000,00	-
	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan (2 Lokasi)	61.850.000	APBD		1 Laporan (2 Lokasi)	68.035.000			
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1 Laporan (3 Lokasi)	359.265.650	APBD		1 Laporan (3 Lokasi)	395.192.215			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	145.600.000	APBD		1 Laporan	160.160.000			
	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	137.278.000	APBD		1 Laporan	151.005.800			
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lapcran (1 lokasi lintas kab/kota)	72.845.350	APBD		1 Laporan (1 lokasi lintas kab/kota)	80.129.885			
	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan (2 lokasi lintas kab/kota)	87.852.950	APBD		1 Laporan (2 lokasi lintas kab/kota)	96.638.245			
	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan (1 Lokasi Lintas Kab/Kota)	153.046.000	APBD		1 Laporan (1 Lokasi Lintas Kab/Kota)	168.350.600			
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1 Laporan	76.913.000	APBD		1 Laporan	84.604.300			
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	94.315.300	APBD		1 Dokumen	103.746.830			
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen (2 Lokasi)	100.621.350	APBD		1 Dokumen (2 Lokasi)	110.683.485			
	Bimtek dan Pengelolaan Urusan Pertanahan	1 kali kegiatan (60 Org)	129.412.400	APBD		1 kali kegiatan (60 Org)	142.353.640			

Padang, Desember 2019



Ir. AKHIRUDDIN
NIP. 19631001 199103 2 006



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.